BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sector publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggran Pendapatan dan Belanja Langsung Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Abdul Hafiz, 2008:2).

Seiring berkembangnya kebutuhan pengelolaan keuangan daerah, semakin dirasakan pula pentingnya fungsi perbendaharaan dalam pengelolaan anggaran secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut seperti merencanakan anggaran, penatausahaan anggran secara transparan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah.

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan dalam peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, asas umum tersebut adalah sebagai berikut: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (Abdul Hafiz, 2008: 18). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Serta terjadinya reformasi pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengharuskan penyajian anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka Departemen Dalam Negeri melaksanakan kegiatan *Development of Regional Financial Management Information and Reporting.* (Modul SIPKD).

SIPKD (Sistem Informasi Pengeloaan Keuangan Daerah) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. (www.usadi.co.id). Prosedur pengelolaan keuangan daerah khususnya penatausahaan anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penatausahaan anggaran. Prosedur tersebut dimulai dengan menerbitkan DPA-SKPD

dan diakhiri dengan penerbitan SP2D dan pencairan SP2D oleh Bendahara Pengeluaran.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti kesalahan dalam menginput data dalam sistem, kurang nya koordinasi antar staf di sub bagian keuangan. (Adi Nugroho)

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas pengelolaan keuangan khususnya penatausahaan anggaran daerah di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan judul **"Tinjauan Atas Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Menggunakan SIPKD Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud dari kerja praktek ini adalah untuk meninjau atas prosedur pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Serta mendapatkan data mengenai prosedur pengelolaan keuangan atau penatausahaan anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sedangkan tujuan dari laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pengelolaan keuangan atau penatausahaan anggaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui tentang SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

3. Mengetahui penatausahaan anggaran dengan menggunakan SIPKD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Melalui Kuliah Kerja Praktek ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini kegunaan kerja praktek yang dilihat dari beberapa sisi :

1. Bagi Penulis

   diharapkan bagi penulis dapat menambah pengetahuan mengenai prosedur pengelolaan keuangan atau penatausahaan anggaran dengan menggunan SIPKD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Akademis

   Memberikan gambaran dan literature mengenai prosedur penatausahaan anggaran dan perbandingan untuk penelitian lainnya.

3. Bagi Instansi

   Dapat menjadi masuskan yang berarti bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan penatausahaan anggran dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah menjadi lebih efektif.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam menyusun laporan kerja praktek ini penulis menggunakan metode kerja *block release* yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode. Selain itu juga penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar laporan yang dihasilkan sesuai dengan judul dan harapan penulis. Berikut adalah teknik yang dilakukan dalam mendapatkan dan mengumpulkan data:

1. Studi Lapangan

   Yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara langsung pada objek yang ditelilti. Studi lapangan dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

   - **Observasi,** penulis melakukan pengamatan secara langsung ke instansi atau bagian yang terkait yaitu Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan mencatat semua informasi yang ada.
   - **Wawancara,** penulis melakukan tanya jawan secara langsung baik itu secara formal maupun non formal dengan pihak-pihak yang terkait salah satunya dengan staf Sub Bagian Keuangan yang juga menjadi pembimbing bagi penulis dalam permasalahan yang akan dibahas dalam laporan kerja praktek, yaitu mengenai prosedur penatausahaan anggaran dengan menggunakan SIPKD.
   - **Dokumen,** penulis mendapatkan dokumen berupa hardcopy maupun softcopy yang bersangkutan dengan laporan kerja praktek.

2. Studi Kepustakaan

   Penulis membaca literature yang bersangkutan tentang prosedur, sistem penatausahaan anggaran atau pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi bahan dalam penulisan laporan kerja praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek yang menjadi tempat terlaksananya kegiatan kerja praktek adalah di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Surapati Nomor 71 Telp. 250 3884 Fax 2500713 Bandung. Waktu kerja praktek dimulai pada tanggal 1 juli 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013.

Table 1.1 Aktivitas Kerja Praktek

Hari Kerja	Waktu
Senin – Kamis	07.30 – 16.00 WIB
Jumat	07.30 – 15.30 WIB
Sabtu – Minggu	Libur